

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemberlakuan AFTA (Asean Free Trade Area) di kawasan Asia menjadi bukti bahwa dunia usaha menjadi faktor penting berkembangnya suatu Negara. AFTA menjadikan perdagangan antar Negara Asia semakin mudah terjangkau, hal tersebut mengakibatkan tingkat persaingan dunia usaha semakin tinggi. Perusahaan-perusahaan di setiap Negara dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat bersaing. Setiap Perusahaan berlomba-lomba menyuguhkan segala keunggulan dari produknya yang menjadi kekuatan dalam bersaing.

Tingkat penjualan menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya. Dengan adanya perdagangan bebas sebagai wujud berkembangnya dunia usaha, tingkat penjualan lebih memerlukan perhatian yang mendalam agar dapat efisien dan efektif. Komponen-komponen penting yang menunjang seperti daerah pemasaran, sumber daya yang digunakan, modal investasi, dan sumber daya manusia mengalami perkembangan, akibatnya aktivitas perusahaan semakin bertambah, tanggung jawab manajemen dalam mengendalikan kegiatan perusahaan semakin luas.

Karena semakin luas tanggung jawab manajemen, maka manajer tingkat atas akan mendelegasikan wewenang kepada bawahannya. Walaupun wewenang dapat dilimpahkan kepada bawahannya, namun tanggung jawab masih berada di

tangan manajer tingkat atas. Untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan dan penyelewengan akibat dari semakin luasnya tanggung jawab manajemen. Manajer membutuhkan alat Bantu pengendalian untuk mengawasi jalannya aktivitas perusahaan.

Pengendalian internal meliputi kebijakan, prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi, dan manusia dalam perusahaan tersebut. Pengendalian internal berperan dalam mengamankan dan melindungi baik aktiva maupun catatan perusahaan . Dengan adanya pengendalian internal dapat memberikan keyakinan bahwa hasil laporan yang diperoleh dari bawahan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, yang nantinya akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Dari sekian banyak pengendalian internal, untuk Perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit dibutuhkan pengendalian internal piutang usaha. Karena penjualan kredit itu sendiri akan menimbulkan piutang usaha dan uang akan diterima pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syarat kredit yang telah disepakati, misalnya: 2/10-n/30, artinya uang kas akan diterima bulan berikutnya ( 30 hari setelah tanggal penjualan ) akan tetapi bila pelanggan dapat melunasi dalam waktu 10 hari setelah tanggal penjualan akan mendapatkan potongan harga sebesar 2 %. Melihat contoh diatas, adanya tenggang waktu antara tanggal penjualan dengan tanggal penerimaan kas, perusahaan perlu menetapkan kebijakan dan prosedur yang akan digunakan. Hal tersebut dikarenakan berhubungan dengan penerimaan uang kas yang sangat fundamental bagi perusahaan.

Kecurangan dan penyelewengan dalam setiap transaksi piutang usaha mungkin saja terjadi. Adapun istilah-istilah yang biasa digunakan adalah *lapping*, yaitu mengendurkan pencatatan penerimaan piutang, *kitting*, yaitu kecurangan yang berhubungan dengan transaksi antar bank (memanfaatkan jeda antar bank), *window dressing*, yaitu membuat persekongkolan antar pegawai dalam membuat gambaran yang bagus dan bukan yang sebenarnya. Kecurangan dan penyelewengan tersebut jelas menghambat perusahaan dalam penerimaan kas yang nantinya akan disalurkan untuk transaksi lain, seperti pembayaran gaji, dan pembayaran hutang perusahaan. Bila dibiarkan terus menerus tidak menutup kemungkinan perusahaan akan bangkrut. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap jalannya pengendalian internal piutang usaha. Pengendalian internal akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan pemeriksaan internal yang baik. Peran suatu badan independen dibutuhkan dalam perusahaan. Badan ini berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian piutang usaha yang telah ditetapkan. Badan ini akan menguji dan menilai apakah pelaksanaan transaksi piutang usaha dari mulai timbulnya piutang dengan ditetapkannya persetujuan kredit oleh manajer divisi kredit sampai diterima dalam bentuk uang kas dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu badan tersebut berhak memberikan rekomendasi dan saran mengenai tindakan lain yang juga diperlukan oleh manajer dalam mengendalikan transaksi piutang, Sehingga kecurangan dan penyelewengan dapat diminimalisasi dan ditemukan dengan segera.

PT. (Persero) Angkasa Pura II merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dibidang jasa penerbangan (Aeronautika) serta pelayanan jasa penunjang bandar udara (Non-Aeronautika). PT. (Persero) Angkasa Pura II berperan dalam mengelola bandar udara di Indonesia . Perusahaan ini membawahi 10 bandar udara di Indonesia, yaitu bandar udara Soearno Hatta, bandar udara Halim Perdanakusuma, bandar udara Husein Sastranegara, bandar udara Polonia, bandar udara Sultan Iskandarmuda, bandar udara Sultan Mahmud Badarrudin II, bandar udara Supadio, bandar udara Sultan Syarif Kasim II, bandar udara Tabing, bandar udara Kijang.

Sumber pendapatan utamanya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pendapatan aeronautika (berhubungan dengan jasa penerbangan) dan pendapatan non-aeronautika (di luar usaha jasa penerbangan). Pendapatan yang diperoleh dalam bentuk tunai dan non-tunai. Untuk pendapatan non-tunai diterima dalam bentuk piutang usaha yang nantinya ditagihkan ke setiap masing-masing *airlines*, setelah itu baru diserahkan ke bagian komersil perusahaan.

PT. (Persero) Angkasa Pura II merupakan pembina dalam pengendalian piutang usaha untuk cabang-cabang bandar udara yang dibawahinya. Perusahaan melakukan pengendalian terhadap piutang usaha yang mencakup segala kebijakan dan prosedur yang memadai, seperti menerapkan skedul umur piutang (*aging schedule*) dan menetapkan jangka waktu penagihan (*Days sales outstanding*).

Salah satu bandar udara yang dibawahi oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II adalah bandara udara Soekarno Hatta. Bandar udara Soekarno Hatta merupakan bandar terbesar di Indonesia. Transaksi yang terjadi begitu banyak dan kompleks

termasuk transaksi piutang usahanya. Pendapatan terbesar PT. (Persero) Angkasa Pura II diperoleh dari bandar udara tersebut, yaitu sekitar 75 % nya. Berikut adalah data piutang usaha dan piutang ragu-ragu yang diperoleh di bandar udara Soekarno Hatta:

<b>POSISI PER</b>	<b>PIUTANG USAHA</b>	<b>PIUTANG RAGU-RAGU</b>	<b>% PIUTANG RAGU-RAGU TERHADAP PIUTANG USAHA</b>
31 DES 2004	237.238.930.736.00	37.756.084.774.00	15.9 %
31 DES 2005	274.026.934.573.00	66.717.220.706.00	24.3 %
31 AGTS 2006	383.747.997.933.91	51.979.275.868.78	13.5 %

Sumber: PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Soekarno Hatta

Pengendalian internal terhadap piutang usaha memerlukan perhatian khusus oleh manajemen. Transaksi piutang usaha berhubungan dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Segala bentuk penyelewengan atau piutang ragu-ragu yang meningkat harus dapat dianalisa penyebabnya. Di tempat penulis melakukan penelitian sudah terdapat pengendalian internal piutang usaha yang memadai. Namun apakah pengendalian yang diterapkan sudah benar-benar berjalan efektif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: “ **PERANAN PEMERIKSAAN INTERNAL**

**DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL  
PIUTANG USAHA (Studi kasus pada PT. (Persero) Angkasa Pura II  
bandar udara Soekarno Hatta Jakarta.**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengendalian internal atas piutang usaha yang dilaksanakan di PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Soekarno Hatta.
2. Bagaimanakah pemeriksaan internal atas piutang usaha yang dilaksanakan di PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Soekarno Hatta.
3. Seberapa besar peranan pemeriksaan internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha di PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Soekarno Hatta.

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengendalian internal atas piutang usaha yang dilaksanakan di PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Soekarno Hatta.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan internal atas piutang usaha yang dilaksanakan di PT. (Persero) Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Soekarno Hatta.
3. Untuk menguji apakah pemeriksaan internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian intern piutang usaha di PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar udara Soekarno Hatta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman sampai sejauh mana pemeriksaan intern berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian intern piutang usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek di lapangan.
3. Sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi pihak-pihak yang memerlukan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Perkembangan dunia usaha, menjadikan setiap perusahaan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Transaksi menjadi semakin meningkat, khususnya untuk tingkat penjualan. Meningkatnya penjualan produk, meluasnya daerah pemasaran dan bertambahnya sumber daya yang digunakan, semakin memperluas tanggung jawab manajemen dalam mengendalikan segala aktivitas perusaha

Struktur organisasi yang mencerminkan pemisahan atas fungsi-fungsi antar departemen operasional, penyimpanan dan akuntansi menyebabkan tanggung jawab manajemen semakin luas. Agar manajer tingkat pusat tidak kehilangan kendali, maka dalam aktivitasnya manajer tingkat pusat harus memonitor segala aktivitas bawahannya. Melihat hal tersebut setiap perusahaan harus memiliki suatu pengendalian internal yang memadai, dimana pengendalian tersebut dapat memberikan jaminan bahwa kondisi dan kejadian yang dilaporkan

setiap departemen adalah benar. Pelaporan tersebut akan berpengaruh terhadap peran manajer tingkat pusat dalam mengambil keputusan.

Untuk lebih memperjelas tentang pengendalian internal, berikut pengertian pengendalian internal menurut beberapa sumber:

Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI )** dalam **Standar Profesional Akuntan Publik (2000,319.2)**:

*“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:*

- *Keandalan laporan keuangan .*
- *Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.*
- *Efektivitas dan efisiensi operasi “*

Menurut **COSO (Committee of Sponsoring Organization)** yang dikutip oleh **Arens Loebecke (2000,287)** pengendalian internal adalah:

*”Internal control includes five categories of control that management design and implementation to provide reasonable assurance that managements control objectives will be met. These are called the components of nternal control and are: (1) the control environment, (2) risk assessment, (3) control activities, (4) information and communication, (5) and monitoring.”*

Pengendalian internal akan berjalan dengan efektif apabila ditunjang dengan pemeriksaan internal yang baik dan memadai. Pemeriksaan internal merupakan bidang yang lebih kompleks dan menantang daripada profesi lain pada umumnya. Pemeriksaan internal berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan pengendalian internal suatu perusahaan dan kualitas tanggung jawab yang ditugaskan. Orang-orang yang menjalankan pemeriksaan ini tergabung dalam suatu badan independensi dalam perusahaan yang memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan. Seorang auditor internal

harus memiliki kegiatan yang terpisah dengan kegiatan yang diperiksanya. Berikut adalah pengertian pemeriksaan internal Menurut **Boyton, Jhonson, Kell** dalam bukunya **Modern Auditing**, yang dikutip oleh **Ichsan Setyo Budi** dan **Herman Wibowo (2003: 491)** menjelaskan bahwa:

**“Pemeriksaan internal adalah aktivitas pemberian keyakinan sistem konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pemeriksaan internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen resiko, pengendalian dan pengelolaan”.**

Adapun tujuan dari pemeriksaan internal menurut **Hiro Tugiman (2006: 11)**, yaitu:

**“Membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut pemeriksaan internal akan melakukan analisa-analisa dan penilaian-penilaian serta memberikan rekomendasi dan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan dan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.”**

Berdasarkan uraian di atas pemeriksaan internal yang dilaksanakan secara tepat terangkum dalam tiga kata kunci, yaitu:

- Memastikan (menentukan, memverifikasi)
- Menilai (mengevaluasi, menaksir)
- Merekomendasi (memberi saran)

Ketiga hal diatas dilakukan dalam keadaan independen dalam organisasi.

Menurut **Hiro Tugiman (2006:53)**, mengemukakan bahwa proses pemeriksaan internal yang harus dilakukan yaitu:

### **1. Perencanaan Pemeriksaan**

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.
- b. Memperoleh informasi dasar ( *background information* ) tentang kegiatan yang diperiksa.
- c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan.
- d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
- e. Melaksanakan survai untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan.
- f. Penulisan program pemeriksaan.
- g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.
- h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.

### **2. Pengujian dan pengevaluasian informasi**

Pemeriksaan internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

### **3. Penyampaian hasil pemeriksaan**

Pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya.

### **4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.**

Pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*Follow up* ) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan tepat.

Diantara sekian banyak pengendalian internal yang membutuhkan pemeriksaan dalam perusahaan, terdapat pengendalian internal piutang usaha. Berikut ini menurut munawir (2005:39) mengenai pengertian piutang usaha. Pengertian piutang usaha dalam arti luas tidak hanya tagihan perusahaan kepada pihak lain ( langganan) yang timbul karena adanya penyerahan barang dan jasa, melainkan termasuk berbagai macam piutang, misalnya pembayaran dimuka kepada pegawai, peminjaman, kepada direksi, piutang pemesanan modal saham, dan lain-lain. Sedangkan pengertian piutang usaha dalam arti sempit adalah tagihan kepada langganan yang timbul sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan atau jasa yang tidak disertai janji tertulis yang diatur undang-undang untuk pembayarannya. yang dikemukakan oleh Mulyadi, adalah sebagai berikut:

*“Piutang usaha merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Pada umumnya disajikan di neraca dalam dua kelompok yaitu piutang usaha dan piutang non usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang non usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar misalnya: piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang deviden dan bunga”*( 2:1998:85).

Piutang usaha timbul dari transaksi penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang usaha semacam ini normalnya akan tertagih pada periode waktu 30 atau 60 hari. Walaupun perusahaan sudah menetapkan periode penagihan piutang, sebagai salah satu alat pengendalian piutang usaha, namun pada kenyataannya masih banyak piutang yang tidak dapat tertagih. Tidak ada ketentuan umum yang digunakan untuk menentukan kapan suatu piutang menjadi

tidak tertagih. Makin lama peredaran piutang semakin kecil kemungkinan piutang tersebut dapat tertagih. Karena itulah perusahaan-perusahaan mengestimasi berapa besar piutang ragu-ragu yang harus ditetapkan setiap tahunnya.

Salah satu alat pengendalian lain yang berfungsi memudahkan dalam memilah-milah piutang sesuai umurnya, adalah penggunaan skedul umur piutang (*aging schedule*), yaitu suatu laporan yang menunjukkan berapa lama piutang usaha telah beredar. Skedul tersebut harus dikembangkan dari buku tambahan piutang usaha. Akan tetapi, bagi perusahaan yang telah maju umumnya mengkomputerisasi catatan piutang mereka, sehingga mudah untuk menentukan umur dari setiap faktur. Skedul umur piutang harus terus dipantau oleh manajemen, untuk mengetahui sejauh mana departemen kredit dapat berjalan dengan efektif. Bila skedul umur piutang memperlihatkan pertambahan persentase piutang yang telah lewat jatuh tempo, kebijakan penjualan kredit mungkin perlu diperketat.

Pengendalian internal atas piutang usaha berhubungan dengan fungsi pengesahan kredit dan melibatkan penyelidikan kredibilitas pelanggan dengan menggunakan referensi dan pemeriksaan atas latar belakang pelanggan. Berikut langkah-langkah pengendalian internal atas piutang usaha yang memadai yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan menurut Amin Widjaja Tunggal, adalah sebagai berikut :

- a. Semua penjualan kredit harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- b. *Statement of account* harus dikirimkan kepada langganan secara rutin.

- c. Pemisahan fungsi pegawai yang menangani bagian piutang harus dipisahkan dari bagian penagihan dan penerimaan kas. Pejabat yang berwenang untuk menghapus piutang tidak diperkenankan untuk menangani bagian piutang ataupun bagian penerimaan kas.
- d. Pencatatan atas data harus dilaksanakan oleh petugas pencatatan piutang dan data tersebut diperoleh dari sumber yang independen. Jumlah pencatatan ke perkiraan pelanggan secara berkala harus dicocokkan dengan jumlah yang dinyatakan dalam buku besar.
- e. Petugas pencatatan piutang tidak boleh turut serta dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang tersebut.
- f. Seluruh kegiatan harus dicatat secepat mungkin sehingga dengan demikian saldo perkiraan piutang dapat tersedia secepat mungkin.
- g. Kesalahan yang dilaporkan atau ditemukan harus diselidiki dengan segera.
- h. Promes harus disimpan di tempat yang aman di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dan harus diperiksa secara berkala.

Pengendalian internal atas piutang usaha harus diperiksa keefektifannya. Mengingat bahwa pada kenyataannya suatu pengendalian memiliki keterbatasan. Pengendalian internal atas piutang usaha yang efektif akan tercapai apabila tujuan pemeriksaan internal atas piutang usaha dapat tercapai. Menurut **Arens, Elder, dan Beasley (2003: 221)** tujuan pemeriksaan terkait dengan saldo piutang usaha, adalah sebagai berikut :

- a. **Keberadaan**- Nilai yang tercantum memang benar-benar terjadi.
- b. **Kelengkapan**- Nilai yang mempengaruhi saldo akun telah dicantumkan.

- c. **Akurasi**- Nilai-nilai yang tercantum adalah benar.
- d. **Klasifikasi**- Nilai-nilai yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
- e. **Cutoff**- Berbagai transaksi yang terjadi di sekitar tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat.
- f. **Kaitan Rinci**- Berbagai rincian dalam saldo akun sesuai dengan nilai-nilai dalam *master file* yang terkait, tercakup dalam nilai total saldo akun, dan sesuai dengan nilai total dalam buku besar.
- g. **Nilai yang terealisasi**- Berbagai aktiva dicantumkan dalam sejumlah nilai yang diperkirakan akan terealisasi.
- h. **Hak dan Kewajiban**.
- i. **Penyajian dan Pengungkapan**- Saldo-saldo akun dan berbagai ketentuan pengungkapan yang terkait dengan saldo akun tersebut telah disajikan dengan tepat dalam laporan keuangan.

Selain tujuan pemeriksaan internal atas piutang usaha, dibawah ini terdapat unsur-unsur pengendalian internal menurut *COSO (Committee of Sponsoring Organization)* yang dikutip oleh Arens Loebecke (2000,287), dimana unsur-unsur tersebut juga mendukung tercapainya pengendalian internal yang efektif, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *the control environment.*
2. *risk assessment.*
3. *control activities.*
4. *information and communication.*

*5. and monitoring.”*

Berdasarkan uraian diatas dan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai topik penelitian serupa, yaitu Persepsi Staf Internal Audit dan Staf Bagian Akuntansi mengenai Peranan Pemeriksaan Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha oleh Andri Maulana. Dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut : “ **Pemeriksaan internal yang dilaksanakan dengan memadai, akan berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha** “.

### **1.6 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus, dimana data-data yang diperoleh selama penelitian akan diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada guna memenuhi tujuan penelitian untuk keperluan pengujian diperlukan serangkaian langkah-langkah, dimulai dari penentuan populasi dan sample, operasionalisasi variabel, rancangan pengujian hipotesis dan teknik pengumpulan data.

Berikut penjelasan singkat dari langkah-langkah tersebut di atas:

#### **1. Penentuan Populasi Penelitian.**

Populasi meliputi seluruh staf pemeriksaan internal yang ada di bagian internal audit. Sedangkan penentuan sampel dilakukan secara acak sederhana.

#### **2. Operasional Variabel**

Operasional variabel sesuai dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Peranan pemeriksaan internal sebagai Variabel Independen (X).
- b. Efektivitas Pengendalian Internal piutang usaha sebagai variabel Dependen m (Y).

### 3. Rancangan Pengujian Hipotesis

Rancangan hipotesis dimulai dengan ditetapkannya hipotesis sebagai berikut :

Ho = tidak terdapat peranan yang positif dari pemeriksaan internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha. H1 = terdapat hubungan yang positif dari pemeriksaan internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha. Kemudian dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan analisa korelasi Rank Spearman untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Disini penulis menggunakan program SPSS dalam pengolahan data. Terakhir dilakukan pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah hipotesis yang dibuat diterima atau ditolak.

=====

**Rumus :**

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n^3 - n}$$

n = Banyaknya sampel

d = Selisih range dari variabel X dan variabel Y yang ke- i

Rs = Koefisien Korelasi Rank Spearman

#### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian.

#### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan penulis di PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Pusat-Jakarta. Bandara Soekarno-Hatta. Tlp. (021) 5505856. Waktu penelitian dilakukan dari bulan September sampai dengan selesai.